

PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM

Hawik Ervina Indiworo

Universitas PGRI Semarang

Email: indiworo1983@gmail.com

ABSTRACT

SMEs industry in Indonesia is currently so rapidly, it is evident with the sector of SMEs able to survive in times of economic crisis. Besides the educational factors, the emergence of women's issues can not be separated from ideological, structural and cultural factors, all three of which are linked to strengthen a situation that is very unfavorable to women. Women's participation in various sectors is very high, in accordance with the advantages of women such as diligent, meticulous, tenacious, patient, honest, tough, high sense of responsibility, strong will, high spirits and discipline. Therefore, the government needs to provide guidance to SMEs managed by women with the help of soft loans and equip them with entrepreneurship and management training so that women managed SMEs can develop well.

Keywords: *women, SMEs*

ABSTRAK

Industri UMKM di Indonesia saat ini begitu pesat, hal ini terbukti dengan sektor UMKM mampu bertahan pada saat krisis ekonomi. Disamping faktor pendidikan, munculnya persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, ketiganya saling terkait menguatkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Peran serta wanita dalam berbagai sektor sangat tinggi, sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita seperti tekun, teliti, ulet, sabar, jujur, tangguh, rasa tanggung jawab tinggi, kemauan keras, semangat tinggi dan disiplin. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan dengan bantuan kredit lunak dan membekali dengan pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

Kata Kunci: perempuan, usaha kecil menengah mikro

PENDAHULUAN

Peran serta UMKM dalam perekonomian nasional tidak diragukan lagi terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional (Faraz, 2013). Ketika Indonesia dilanda kritis, pemerintah baru tersadar bahwa usaha besar yang dibangga-banggakan justru sebagian besar bangkrut/gulung tikar dan memberikan beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha kecil yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan, bahkan berkembang. Ternyata, meskipun selama ini praktek layanan publik dirasakan usaha kecil tidak fair, namun mereka mampu menunjukkan kekenyalannya, usaha kecil tetap mendayung sampannya di antara karang-karang lautan yang berombak besar dan berubah-ubah karena tiupan angin kencang. Namun demikian, walau usaha kecil mempunyai daya juang luar biasa, untuk bertahan hidup dan berkembang perlu diberikan lingkungan berusaha dan dukungan-dukungan lain untuk meningkatkan daya saing dan daya tumbuhnya. Untuk itu isu pembinaan dan pengembangan usaha kecil (termasuk mikro), menengah semakin digalakkan. Identifikasi kebutuhan dan masalah usaha kecil perlu terus dilakukan dalam upaya

meningkatkan daya tumbuh dan daya saingnya (Hatifah, 1995, dalam febriani 2012).

Menurut Purwanto (2010, dalam Primingtyas), para pengusaha kecil menengah (UKM) mengalami kesulitan dalam mengakses kredit perbankan karena masih terjadi perbedaan perspektif antara sisi UKM dan sisi perbankan dalam pemberian kredit. Namun, tekanan yang dihadapi perbankan berupa semakin ketatnya persaingan dan semakin menipisnya keuntungan dari segmen korporasi (perusahaan besar), memaksa perbankan untuk masuk ke segmen UKM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 209 juta merupakan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Dari jumlah tersebut 105 juta (50,24%) adalah wanita dan 104 juta (49,76%) pria. Separuh jumlah penduduk tersebut tinggal di kota, persentase penduduk wanitadan pria di kota dan di desa tidak jauh berbeda, yaitu di kota : 50,1% wanita dan 49,9% pria, sedang di desa: 49,7% wanita dan 50,3% pria. (Siswanto, 2009)

Partisipasi perempuan dalam kegiatan untuk pendirian usaha juga lebih rendah, di mana laki-laki dua kali lipat frekuensinya dibandingkan dengan kaum perempuan. Proporsi tersebut makin buruk pada negara-negara berkembang, karena partisipasi laki-laki hampir

mencapai 75% (Minniti dan Arenius, 2003, dalam Jati, 2009). Ketimpangan tersebut di atas didukung oleh Wilson (2007 dalam Jati, 2009), yang menyatakan bahwa kepemilikan perempuan terhadap usaha di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin hanya 25%, sedangkan sisanya dimiliki oleh laki-laki. (Widowati, 2012)

Keberadaan wirausahawan perempuan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah realitas kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peran perempuan pelaku usaha mikro dalam perekonomian Indonesia lambat laun ternyata makin menjadi “penjaga gawang” perekonomian rakyat. Data kepemilikan UMKM menunjukkan secara rinci bahwa sebanyak 44,29% usaha mikro dikelola oleh perempuan, demikian pula di sektor usaha kecil sebanyak 10,28% (BPS, 2005, dalam Jati, 2009). Sedangkan, laporan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Oktober, 2007, dalam Jati, 2009) menyatakan bahwa 60% dari 41 juta pengusaha mikro dan kecil di Indonesia adalah perempuan. (Widowati, 2012)

Wanita potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut

menyebarkan di berbagai bidang maupun sektor lainnya (Sumampaw, 200). Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses recovery ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan ini. Dalam kondisi demikian kajian dengan tema .wanita dan pengembangan usaha relevan untuk dibicarakan, khususnya dalam upaya menyalurkan pemulihan ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan wanita. Disamping wanita sangat potensial dan memiliki kompetensi dalam pengembangan usaha kecil, wanita tersebut sebagai pelaku bisnis, pengelola pembina/pendamping, ataupun sebagai tenaga kerja. Tentu saja masih terus ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilannya (Hesti, 1996 dalam Febriani 2012)

Pengelolaan UMKM pada umumnya dikelola secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga, meskipun pada awalnya usaha tersebut dirintis oleh perempuan (istri), namun pada akhirnya keterlibatan laki-laki (suami) dalam kadar tertentu tidak dapat dihindarkan. (Swastuti, 2013).

Pengelolaan secara bersama-sama ini menyebabkan membaurnya manajemen usaha dan manajemen rumah tangga, sehingga seringkali terjadi kekacauan manajemen usaha, karena tidak ada pemilahan secara tegas antara manajemen usaha dan manajemen keluarga. Pendapatan usaha yang semestinya digunakan untuk meningkatkan usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat mendesak dan bersifat tidak terduga. (Swastuti, 2013)

KAJIAN PUSTAKA

Secara umum masih sedikit diantara kita yang menyadari bahwa perempuan menghadapi persoalan yang spesifik gender, yaitu persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan. Tidak saja di kalangan laki-laki, tapi kaum perempuan sendiri yang masih banyak tidak menyadari hal tersebut, sehingga memandang tidak perlu persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena mendalamnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap sudah kodratnya perempuan sebagai ratu rumah tangga, sebagai pengendali urusan domestic saja begitu dominan di masyarakat kita, sehingga adanya pikiran dan keinginan

mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sesuatu yang mengada-ada, sehingga tidak aneh muncul paradigma perempuan tidak perlu sekola tinggi karena pada akhirnya hanya akan mengurus sekitar kasur, sumur, dan dapur. (Sri Lestari, 2007, dalam Siswanto 2009)

Seiring dengan kemajuan arus globalisasi, wanita sudah mulai menampakkan kemampuannya walaupun masih lebih rendah dibanding laki-laki, ditunjukkan oleh data BPS tahun 2000, wanita sekarang mulai terlihat memiliki motivasi untuk terjun dibidang wiraswasta atau usaha dengan alasan mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya sudah lama sebagian wanita Indonesia terlibat dalam wiraswasta namun karena adanya persoalan spesifik gender (Siswanto, 2009). Dalam hal keterlibatan perempuan Indonesia dalam dunia usaha atau sebagai pengusaha/wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu wanita telah terjun dalam dunia perdagangan, misalnya wanita-wanita di Solo telah membantu ekonomi keluarga bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluargadari usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya di Palembang, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang, wanita-wanita sukses mengelola industri rumah tangga berupa

kain songket, di daerah-daerah lain terkenal dengan berbagai jenis kerajinan tangan ataupun makanan sebagai ciri khas suatu daerah adalah hasil karya tangan-tangan perempuan (Harsosumarto, 2007)

Forum APEC Women And The Economy beberapa waktu yang lalu mengambil tema ‘Women As Economic Drivers’. Pasalnya, 96 persen pelaku kewirausahaan adalah UKM, sementara 60% pelaku UKM adalah perempuan. Dengan melihat kondisi tersebut, perempuan saat ini menjadi penggerak ekonomi atau “Women as Economic Drivers” demikian pernyataan Linda Amalia Sari Gumelar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (Suara Karya Online, 2013, dalam Faraz 2013).

Dalam forum internasional seperti APEC disepakati agar masing-masing ekonomi memberikan perhatian bagi perkembangan perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong agar mengembangkan disintegrasikan data agar pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha yang adalah UKM menjadi lebih terarah. Indonesia sendiri yang menjadi anggota APEC belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang

jumlah perempuan pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM sehingga upaya pemerintah dalam pemberdayaan terhadap perempuan di sektor UMKM masih dilakukan secara minimal. (Dipta, 2009 dalam Priminingtyas 2012)

Demikian juga berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2010) sekitar 60% UKM dikelola oleh perempuan Indonesia. Hal ini tanpa disadari bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Peran perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat namun juga: 1. Mengurangi efek fluktuatif ekonomi, 2. Berkontribusi dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan, 3. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Faraz, 2013)

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (perancangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan

untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh. (Priminingtyas, 2010, dalam Faraz 2013)

Indonesia sendiri yang menjadi anggota APEC belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masih dilakukan secara minimal. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola oleh kaum perempuan melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera). Dengan perkuatan masing-masing Rp.100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. Perkuatan ini diharapkan mampu mengembangkan perempuan pengusaha khususnya anggota koperasi. (Dipta, 2012)

Para ekonom biasanya menyebutkan ada lima keadaan yang memungkinkan industri kecil dapat bertahan (Supratikno; dalam Yustika, 2007:183). Pertama, usaha industri kecil bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah (fragmented market). Kedua, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Ketiga, usaha kecil memiliki heterogenitas yang tinggi, khususnya teknologi, sehingga industri kecil dapat menghasilkan produk yang beraneka ragam. Keempat, usaha industri kecil tergabung dalam suatu cluster (sentra industri), sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif (modal sosial) misalnya dalam hal pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja terampil, dan dalam hal pemasaran. Kelima, usaha-usaha industri kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk industri kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh produk-produk industri berskala besar. (Hanoeboen)

Dari jumlah UMKM di Indonesia, perempuan sebagai pelaku UMKM memiliki jumlah yang cukup signifikan. Walaupun data mengenai keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, kecil dan menengah masih sangatlah minim namun diyakini berdasarkan fakta yang

ditemukan di lapangan diketahui bahwa mayoritas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dijalankan oleh perempuan, khususnya pada usaha-usaha home industri yang dikelola oleh rumah tangga-rumah tangga. Dilihat dari jumlah unit usahanya UMKM sangat banyak terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusinya sangat besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, namun di sisi lain, ditemukan bahwa banyak usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan banyak mengalami kendala di berbagai aspek usaha yang dijalankannya, sebagai antisipasi permasalahan, maka perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana potensi Usaha Kecil Menengah yang dikelola kaum perempuan sebagai kontributor penetrasi ekonomi. (Hanoeboen)

Keterlibatan perempuan dalam wirausaha, menjadi kajian beberapa peneliti, di antaranya Ardhanari (2007), yang meneliti profil dan hambatan wirausaha perempuan di Indonesia untuk berkembang. Temuannya sangat menarik karena disebutkan hambatan wirausaha perempuan adalah karakteristik personal yang diakibatkan oleh beban kerja akibat peran ganda seorang perempuan dan karakteristik struktural, yaitu hambatan terhadap akses permodalan (syarat dan agunan)

dan akses pemasaran di mana perempuan memiliki akses informasi pemasaran yang rendah. Disimpulkan bahwa hambatan perkembangan wirausaha perempuan adalah akibat gender stereotype (stereotip gender) antara perempuan dan laki-laki dalam lingkungan patriarkhi. (Widowati, 2012)

Wilson et al., (2007) penekanan penelitian pada faktor personal (*personality characteristic*), yaitu self-efficacy. Hasil penelitiannya memberikan data bahwa kaum perempuan memiliki self-efficacy dan self-confidence yang lebih rendah dari kaum laki-laki di bidang matematika, keuangan, pembuatan keputusan, dan problem solving. Padahal hal ini adalah faktor utama yang berhubungan dengan keterampilan dan keahlian laki-laki dan bahkan menjadi determinan dalam mendorong kesuksesan sebagai seorang wirausaha. Selaras dengan Kickkul et al., (2004) yang menyatakan bahwa self-efficacy kaum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Padahal, self-efficacy ini menjadi faktor penting bagi wirausaha dalam mengembangkan dan menguasai skill yang dibutuhkan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kesuksesan karir. (Widowati, 2012)

Zulminarni (2004) menemukan bahwa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan kewirausahaan adalah faktor manusia yang meliputi: kepribadian pelaku usaha, pendidikan, lingkungan, pengalaman, dan kemampuan memperoleh uang, nilai sosial, budaya, dan peluang yang ditentukan oleh lingkungan, rangsangan ekonomi seperti peluang pasar, keuntungan yang diperoleh, permintaan yang bersifat elastis, iklim usaha dan peraturan pemerintah. Hayati (2007) menemukan bahwa kepribadian entrepreneur merupakan faktor utama, menyusul sesudahnya faktor kemampuan, faktor teknologi, dan faktor lain. Sifat kepribadian yang paling banyak dibahas oleh para ahli dalam kaitan dengan wirausaha, adalah sifat kreatif dan inovatif. (Widowati, 2012)

Hasil penelitian (Study Kasus) yang dilakukan Agus Mansur dkk (2008) kunci sukses perempuan UKM di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa faktor-faktor perencanaan yang meliputi layanan informasi, konsultasi, bimbingan dan ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan serta faktor pelaksanaan pelaksanaan yang meliputi layanan pelatihan, fasilitas pengembangan organisasi dan

manajemen, dan juga faktor pengembangan yang terdiri penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitas dalam memperluas pasar dan penguasaan teknologi dan yang terakhir faktor motivasi yang meliputi kebutuhan fisiologis, aktualisasi diri dan berprestasi ternyata memiliki hubungan yang simultan dan signifikan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh sebesar 71.6 % terhadap kinerja, sedangkan 28.4 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Sukesi (2002) fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah terjadi karena dorongan kebutuhan, kemauan dan kemampuan serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses wanita atas kesempatan tersebut. Status ekonomi wanita dilihat dari aktivitasnya dalam kegiatan mencari nafkah, akses terhadap faktor produksi, tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga.

Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ada empat kelompok perempuan yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) kelompok perempuan yang sama sekali tidak mampu dan tidak memiliki sumber-sumber karena beban kemiskinan; (2) perempuan yang memiliki sumber-sumber tetapi belum/tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya; (3) perempuan yang telah melakukan usaha

namun tidak memiliki sumber-sumber; dan (4) perempuan yang telah memiliki kemampuan dan peran serta mampu memanfaatkan sumber-sumber.

Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Berkaitan dengan upaya peningkatan peran perempuan pengusaha dalam pengangguran, maka disamping perlu adanya data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha, kiranya juga harus dipahami masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan peta yang jelas, maka akan dapat disusun program dan kegiatan yang terarah dalam pengembangan perempuan pengusaha ke depan. Namun demikian, mempelajari secara tersirat selama ini kelompok perempuan pengusahaseperti banyak bergerak dalam usaha agrobisnis, khususnya sayur-mayur, pedagang jamu, kerajinan, serta warung makan. Untuk sektor industri, tampaknya belum banyak digeluti oleh perempuan. Walaupun demikian, diperkirakan kaum perempuan pengusaha ini cukup memberikan peran

besar dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, karena usaha yang mereka kembangkan memang merupakan usaha yang memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. (Dipta, 2007)

Dalam kenyataannya, meskipun banyak perempuan Indonesia telah banyak memperoleh gelar sarjana, master, bahkan doktor, hanya sedikit sekali pucuk pimpinan baik di pemerintahan maupun swasta yang diduduki oleh perempuan, tentu saja selain perusahaan-perusahaan yang memang dikelola oleh perempuan seperti perusahaan catering, kosmetik, majalah wanita, jasa psikologi, kesenian, atau kerajinan-kerajinan tertentu.

Wanita potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan, untuk itu potensi perempuan perlu ditingkatkan atau paling tidak dikurangi penyebab-penyebab mengapa perempuan sulit maju dalam karier bagi perempuan

bekerja dan sulit maju usahanya bagi perempuan pelaku usaha.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan terbukanya arus globalisasi dan informasi, serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, meskipun tetap lebih rendah dari pada tingkat pendidikan laki-laki sebagai ditunjukkan data BPS tahun 2000, perempuan Indonesia sudah keluar dari tembok batas rumahnya untuk bekerja dan berkarya, baik sebagai pegawai pemerintah, karyawan, perusahaan baik nasional maupun multinasional, serta sebagai pengusaha, dengan tidak mengabaikan peran utamanya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang memutuskan untuk bekerja selain untuk mengoptimalkan pendidikan dan potensinya, juga adanya kesadaran untuk menopang kehidupan rumah tangganya karena dengan semakin majunya peradaban dunia semakin tinggi pula kebutuhan hidup dan rumah tangganya, dan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga mencurahkan waktu sepenuhnya untuk suami dan anak-anaknya adalah keputusan yang baik pula karena sebenarnya kewajiban mencari nafkah menurut agama khususnya Agama Islam adalah berada dipundak pria atau suami. Apalagi setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis pada

pertengahan tahun 1997, PHK dan pengangguran bertambah, karena krisis suami sebagai kepala rumah tangga menjadi pengangguran, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan tak mungkin dihentikan, memaksa para istri yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga mulai berperan di berbagai bidang usaha sebagai pelakon usaha. Menurut hasil penelitian Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM tahun 2001, melalui 32 orang responden menyatakan bahwa motivasi wanita melakukan usaha adalah untuk (1) mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha (2) meringankan beban keluarga (3) mengubah nasib (4) menjadi diri sendiri (5) kaya dan (6) meningkatkan kesejahteraan (Harsosumarso, 2007)

Perbedaan penting yang menentukan jiwa kewiraswastaan, antara pria dan wanita, yang mana kebanyakan wanita sulit untuk maju karena :1). Wanita kurang diajar bersaing, mereka tidak dikembangkan dengan semangat persaingan yang baik dalam dunia usaha. Sejak kehidupan kanak-kanak mereka kurang terlibat, kurang terlatih dalam teamwork, misalnya dalam teamworksport. Mereka kurang bertanding, malahan cenderung menghindari konfrontasi, karena konfrontasi bukan sifat lemah

lembutnya wanita, 2).Wanita terlalu melihat detail perkara-perkara kecil, mereka terlalu terlalu berkepentingan atas hal-hal yang detail dari masalah, sehingga tidak terbiasa melihat kedudukan perspektif keseluruhannya, karena terbiasa dengan hal-hal kecil, melepaskan konteks global perusahaan, akan mengganggu pengembangan jiwa kepemimpinannya, 3). Wanita emosional dalam situasi yang tidak tepat, sehingga banyak wanita menghabiskan waktu memikirkan "apa kata orang nanti" ketika seharusnya dia berpikir secara profesional untuk menyelesaikan tugasnya, sering menanam "perasaan tidak enak" secara berkepanjangan, sering emosional dan sentimental apabila dikritik tentang pekerjaannya, sikap maupun penampilannya, 4).Wanita kurang berani mengambil resiko, berkaitan dengan sering memikirkan "apa kata orang nanti", wanita cenderung melakukan tugas-tugas secara aman dan average (rata-rata kebiasaan, sehingga pimpinan menganggap mereka sebagai pegawai biasa-biasa saja yang rata-rata, tidak akan menuntut jenjang promosinya, 5).Wanita kurang cukup agresif, karena sifat agresif tidak searah dengan pendidikan yang diterimanya selama ini, bahwa wanita harus feminim, jangan agresif, sehingga tidak "berani "

mengungkapkan perasaan dan idenya secara tegas (asertif), dan tidak "berani " mengatakan "tidak" atas pendapat dan sikap teman kerjanya yang diketahuinya salah, 6).Mereka lebih senang bereaksi daripada mengambil inisiatif, mereka terlalu riuh untuk menonjolkan kelebihan pendapat dan kepemimpinannya dan lebih suka jalur yang telah ada, 7).Wanita lebih berorientasi pada tugas dari pada tujuan, berpikir besar pada tujuan dan sasaran, terkalahkan oleh kebiasaannya dalam pekerjaan rutin dan yang detail.

Keberhasilan wanita ditunjang dari kelebihan-kelebihan wanita yang merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wirausaha, kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut harus selalu dijaga dan dikembangkan. Sebaliknya wanita memiliki pula kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi penyebab kegagalannya sebagai pelaku bisnis antara lain: 1.

Memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi, tidak berani mengambil resiko, kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri, terlalu berambisi sehingga menangani usaha diluar kemampuannya. 2. Wawasan sempit sehingga kurang informasi, tidak bisa membagi waktu atas peran gandanya, sibuk dengan urusan keluarga sehingga curahan waktu untuk kegiatan usahanya minimal, kurang sabar atau emosi tinggi. 3. Menetapkan keputusan dengan tergesa-gesa, masih bergantung atau didominasi suami, konsumtive, tidak terbuka, tidak bersungguh-sungguh, yang mana kelemahan-kelemahan tersebut hendaknya diminimalisir. (Febriani, 2012)

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila

dikerjakan dengan sungguh -sungguh. (Priminingtyas, 2007)

Dari sisi peran serta wanita dalam usaha kecil menengah, dapat diketahui bahwa etoskerja para wanita sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana para wanita memiliki keinginan yang sangat besar untuk memberikan kontribusi dalam menyejahterakan keluarganya. Bahkan para wanita menghendaki adanya pengurangan pengangguran. Dua hal ini mengisyaratkan bahwa para wanita tersebut memiliki kegigihan usaha yang tinggi dan perlu diberikan arahan dan wawasan yang benar dan tepat tentang bagaimana mengelola bisnis secara modern. Jika hal ini diberikan, para wanita tersebut dapat menjadi wirausahawati yang sangat tangguh.

Pemberdayaan akses perempuan terhadap sumber daya publik dapat berhu -bungan dengan dampak kredit mikro terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan pinjaman. Kontribusi kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat diidentifikasi dari pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan kredit, seperti siapa yang mengontrol penggunaan kredit, siapa yang mengelola usaha yang didukung oleh kredit, siapa yang mengontrol pemasaran produk, dan siapa yang mengontrol penghasilan yang

didapat dari usaha yang didukung kredit mikro. (Asmorowati, 2005)

GBHN (1999) antara lain mengamanatkan perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Sejalan dengan amanat GBHN di atas perlu dilakukan peningkatan peran wanita dalam pengembangan UKM khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Untuk itu perlu dilakukan kajian peran serta dan kemampuan wanita dalam pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Untuk mengetahui peran serta dan kemampuan wanita dalam pengembangan UKM dapat dibedakan menjadi : 1) wanita sebagai pelaku UKM, 2) wanita sebagai pengelola UKM, dan 3) wanita sebagai pembina, pendamping, dan motivator, yang mana dalam peran tersebut diperlukan pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi kewirausahaan (Anonim, 1992, dalam febriani 2012)

Keterlibatan wanita Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu wanita telah terjun dalam dunia perdagangan (febriani, 2012)

misalnya wanita-wanita di Solo telah membantu ekonomi keluarga bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya di Palembang, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang, wanita-wanita sukses mengelola industri rumah tangga berupa kain songket, di daerah-daerah lain terkenal dengan berbagai jenis kerajinan tangan ataupun makanan sebagai ciri khas suatu daerah adalah hasil karya tangan-tangan perempuan. (Harsosumarto, 2007)

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan modal untuk pengembangan usaha. Umumnya pengelola UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk modal usaha dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena pihak perbankan menganggap UKM tidak layak untuk mendapatkan kredit, karena sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran terjadinya kredit macet. (Priminingtyas, 2010)

Hasil penelitian IFC-PENSA (2004) bersama IWAPI mengungkapkan bahwa ada masalah kesadaran gender dalam mengakses permodalan. Seorang anggota IWAPI mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena pihak eksekutif bank menilai bahwa pinjaman kepada perempuan pengusaha hanya akan meningkatkan angka perceraian.

Stereotipe pihak bank dirasakan perempuan pengusaha sebagai salah satu kendala sulitnya mengakses permodalan dari bank (Agusni, 2007)

Menurut Rose (1992) karakteristik perempuan dibandingkan dengan pria adalah mereka lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita. Hal ini karena perempuan mempunyai cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Disamping kemampuan mengolah sedemikian rupa penghasilan keluarga mereka, para perempuan juga terbukti sangat fleksibel dalam mengkom-binasikan pekerjaan domestik mereka dengan aktivitas yang ditujukan memperoleh pendapatan. Intinya, perempuan mempunyai kontribusi memodernisasikan ide dan ketrampilan jika diberi kesempatan. (Asmorowati, 2005)

Sebagian besar sektor UMKM yang dikelola oleh perempuan, menjadikan perempuan memiliki multi peran dalam mengelola usahanya, dimana perempuan di samping sebagai manager juga merangkap sebagai pekerja. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan keterampilan dalam mengelola suatu usaha supaya bisa berkembang dengan baik. Akan tetapi realita yang ada di masyarakat, banyak perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak

mempunyai skill yang cukup baik dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya banyak yang terpuruk. (Priminingtyas, 2010)

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, perempuan sulit untuk mengakses kredit dari lembaga perbankan. Apalagi persyaratan yang diminta pihak bank kepada UMKM untuk mengajukan kredit sangat banyak termasuk harus adanya jaminan. Jaminan yang disyaratkan pihak bank seperti sertifikat tanah, rumah dan surat kepemilikan kendaraan (BPKB), umumnya di atas namakan suami. Perempuan tidak mempunyai kontrol terhadap sumberdaya yang ada, seperti: tanah, rumah dan kendaraan. Akibatnya banyak UKM yang dikelola perempuan terjatuh dalam hutang rentenir yang sangat memberatkan sehingga usahanya mengalami kebangkrutan.

Selain itu sensitivitas gender berhubungan juga dengan aspek sosial dan lingkungan. Kondisi sosial perempuan harus dilihat juga dari segi kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja usaha perempuan. Pemerintah sendiri sering kali kurang memperhatikan aspek gender ini sehingga apa yang telah

dilakukan oleh Pemerintah menjadi sering kurang bermakna dan tidak tepat sasaran.

Untuk hasil usahanya tersebut, dilihat dari kinerja koperasi/UKM, baik kinerja kelembagaan maupun usahanya. Dengan menganggap faktor luar tidak berpengaruh, maka bila pelaku usaha memiliki kompetensi usaha maka kinerja usahanya akan baik. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dicari faktor-faktor dominan atau kelebihan-kelebihan yang kebanyakan dimiliki wanita yang menyebabkan wanita berhasil, dan diidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki wanita yang biasanya akan menjadi penghambat keberhasilannya, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Untuk peningkatan kemampuan wanita diidentifikasi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil, sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius, sebab usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga, baik perempuan

tersebut “bekerja sendiri” atau sebagai “pekerja keluarga yang tidak dibayar”.Perhatian tersebut antara lain dengan dikeluarkannya berbagai program, seperti kredit program, kredit untuk usaha kecil yang dikenal dengan KIK(Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen). Adapun tujuan sosial politik dari KIK/KMKP ini adalah: a). Untuk membantu usaha kecil yang bergerak disemua sektor perekonomian termasuk pertanian,mendapatkan pinjaman jangka menengah untuk modal investasi dan modal kerja permanent, b). Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil milik pribumi dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang semakin melebar. Pada Pakjant’90 yang isinya penyempurnaan sistem perkreditan, yang antara lain mewajibkan bank komersial menyalurkan 20% portofolio kreditnya untuk usaha kecil, disini KIK/KMKP diganti menjadi KUK(Kredit Usaha Kecil) dengan bunga mengikuti bunga pasar, Dalam pelaksanaannya menurut hasil penelitian Mari Elka Pangestu (1992): dari dana KUK yang tersedia realisasinya pada tahun 1994 (28,50%), tahun 1995 (35,3%), dan tahun 1996 sebesar 42,1%, yang mana lebih separoh dari dana KUK yang tersedia digunakan untuk sektor perhotelan,

perdagangan, restoran, kredit konsumsi golongan menengah keatas, bukan untuk kegiatan produktif usaha kecil. (Harsosumarto, 2007)

Bagi Indonesia, upaya pemerintah dalam memajukan status, peran perempuan dalam pembangunan serta kualitas hidup perempuan tidak terlepas dari perkembangan ini. Program P2W yang dilaksanakan antara tahun 1978 hingga tahun 1992 menggunakan pendekatan Women in Development (WID) yang memfokuskan program pembangunan khusus kepada perempuan. Perempuan menjadi kelompok target dalam peran produktifnya dan lebih sering menjadi objek daripada subjek. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Kemudian Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Kemudian dalam Pelita VI pemerintah mencanangkan pendekatan Gender and Development (GAD) yang memfokuskan program pembangunan tidak khusus bagi perempuan, tetapi juga melihat kepada hubungan peran antar perempuan dan laki-laki. Dari pendekatan GAD diharapkan agar keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan menjadi lebih

setara dan memberikan akses, kontrol dan manfaat kepada pelaku pembangunan itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama dalam Konferensi Perempuan Dunia dan setiap tahunnya Indonesia melaporkan kemajuan - kemajuan yang telah dicapai.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan koordinasi melalui pertemuan lintas sektoral mengisyaratkan perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan di semua sektor. Perkembangan di bidang ekonomi dilihat dari sisi kepentingan perempuan jugasenantiasa diikuti dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perkembangan peranserta perempuan di perkoperasian juga menjadi perhatian pemerintah. Dari pertemuan lintas sektor, diketahui bahwa upaya pemberdayaan lebih ditujukan kepada kelembagaan dan bukan kepada individunya. Penelitian yang dilakukan SMERU (2003) atas kerjasama dengan

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan koordinasi melalui pertemuan lintas sektoral mengisyaratkan perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan di semua sektor. Perkembangan di bidang ekonomi dilihat dari sisi kepentingan perempuan juga senantiasa diikuti dan

dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa Perkembangan perantara perempuan di perkoperasian juga menjadi perhatian pemerintah. Dari pertemuan lintas sektor, diketahui bahwa upaya pemberdayaan lebih ditujukan kepada kelembagaan dan bukan kepada individunya. Penelitian yang dilakukan SMERU (2003) atas kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengindikasikan bahwa telah banyak bantuan pemerintah dan donor yang diberikan, namun ketika dikonfirmasi ke tingkat akar rumput ternyata upaya yang diberikan sangat kecil atau pun tidak sampai. Untuk Koperasi dan Usaha Kecil misalnya, penyediaan permodalan dilakukan melalui pendekatan sentra dimana pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (laki-laki dan perempuan atau masih netral gender) yang ada pada satu wilayah akan mendapatkan pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services (LPB/BDS) dan didukung dengan modal awal padanan melalui koperasi simpan pinjam/unisimpan pinjam koperasi (KSP/USP-kop). Upaya ini tentu saja sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Akibatnya para pengusaha, apa lagi perempuan pengusaha tidak mudah

mendapatkan akses permodalan dengan bunga dan persyaratan yang dapat mereka penuhi.

Bagi perempuan Indonesia, pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar apalagi dengan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun ke tahun. Pengalaman dan pemahaman perempuan dengan arisan dapat membantu perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian bangsa. Perempuan sebetulnya merupakan manajer yang baik dalam usaha (ADB, 2002). Di samping itu, pemberian kesempatan atas hak ekonomi perempuan akan mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Perannya dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan selain meningkatkan rasa percaya diri sebagai aktor pembangunan, tetapi juga memberikan posisi tawar bagi perempuan terhadap rekan sekerja laki-laki (Agusni, 2007)

Perempuan sangat potensial dan memiliki kompetensi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, sehingga perempuan sebagai pelaku bisnis, pengelola, pembina/pendamping, ataupun sebagai tenaga

kerja, tentu saja masih terus perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilannya. (Swastuti, 2013)

Oleh karena itu dengan kebijakan dan program pemerintah dalam rangka pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan melalui bantuan kredit lunak diharapkan sektor UMKM bisa tetap survive. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada UMKM yang dikelola perempuan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

SIMPULAN

Sektor UMKM yang didominasi oleh perempuan mempunyai peranan penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan ekspor Indonesia. Masalah pengangguran merupakan hal yang harus segera ditangani. Keterlambatan menangani pengangguran akan menimbulkan masalah sosial baru yang semakin kompleks ke depan. Mengatasi masalah pengangguran dapat dilakukan dengan pengembangan UMKM yang fokus pada beberapa

sektor/komoditi tertentu dan dengan pendekatan yang terintegratif.

Pada saat ini UMKM masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan usahanya, seperti kurang modal, lemahnya sumber daya manusia kurang menguasai teknologi/pasar memengaruhi kinerja usaha, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan pemecahan secara terpadu. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan dengan bantuan kredit lunak dan membekali dengan pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. Nunuy, 2009. *Beberapa peran kewirausahaan dalam mengatasi tantangan di UMKM*.
- Ardhanari, Margaretha, et. al. (2007). Analisis Personal Dan Struktural PUMIK (Perempuan Pengusaha Mikro) Di Surabaya Dalam Upaya Pengembangan Keberhasilan Usaha Bidang Ritel. Makalah disampaikan pada Lokakarya Regional : "Pengembangan Kewirausahaan Perempuan dalam Usaha Mikro & kecil", Bali, 29-30 November 2007
- Arif Hanoebon, B.R & Sasongko, P. *Strategi Pengembangan Usaha Perempuan Pelaku UMKM di Kota Ambon*

- Aries, V. Siswanto, 2009. Studi Peran Perempuan Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Melalui Teknologi Informasi di Kota Pekalongan *Dinamika Informatika – Vol 1 No 1, Maret 2009* ISSN : 2085-3343
- Dwi, I. Fitriana Sari, *Peranan UKM Tenun Lurik Untuk Menyerap Tenaga Kerja Perempuan (Studi Kasus Kelompok Tenun Sumber Rejeki Tex, Dusun Cabeyan, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)*. UNS.
- Endang Swastuti, 2013, Peran Serta Perempuan Dalam Pengelolaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) Di JAWA TENGAH, *MEDIAEKONOMI DAN MANAJEMEN Vol 27. No 1 Januari 2013*
- Faraz, Nahiyah .J., 2013, *Peran Serta Perempuan Dalam UMKM*.
- Febriani, 2012, Peran Wanita dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor3
- Hetifah, S. dkk, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, Seri Penelitian AKATIGA*, Yayasan AKATIGA 1995.
- Indah Widowati, 2012, Peran Perempuan Dalam Mengembangkan Entrepreneur/Wirusaha Kasus di KUB Maju Makmur Kec. Kejajar Kab. Wonosobo, *Business Conference (BC) 2012*
- Investor Daily Indonesia, 2013. UMKM Kini Didominasi Kaum Wanita. Kamis, 22 Agustus. <http://www.investor.co.id/home/umkm-kini-didominasi-kaum-wanita/67253>
- I Wayan Dipta, 2007, Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran, *Vol 15 No 1 INFOKOP*
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ,2010. *Data UKM yang dikelola oleh perempuan Indonesia* . Jakarta.
- Linda Amalia S.G, 2013, Tingkatkan Peran Perempuan dalam Sektor UKM. *Suara Karya Online*, 9 September 2013. Di unduh 15 Januari 2014
- Priminingtyas, Dina Novia, 2010. Akses Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Mendapatkan Kredit Usaha Dari Lembaga Perbankan Di Kota Malang. *Prosiding Seminar Internasional "The Future of Small Businesses from Accounting, Management and Economics Perspectives"* Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Purwanto, 2010. UKM Kesulitan Akses Kredit Perbankan. Available online with up dates at<http://economy.okezone.com/read/2010/> (Verified 20 April 2010)
- Sulikanti Agusni, 2007, Kekuatan Koperasi Dalam Pemberdayaan Perempuan, *Infokop Vol 15 No.1 2007*
- Zulminarni, Nani, 2004. “Lembaga Keuangan Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Miskin”, *Disampaikan dalam acara workshop Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia yang diselenggarakan oleh GEMA PKM Indonesia dan BWTP di Jakarta 27 Agustus 2004*